Merebut Alat Produksi Menegakkan Kesetaraan;

Perlawanan Perempuan dari Bandung Selatan

Oleh Noviana Ermanital

Keadaan Umum

Kecamatan Pangalengan terletak di selatan Kabupaten Bandung, yang terdiri dari 13 desa yaitu Desa Sukamanah, Marga Mekar, Marga Mulya, Pangalengan, Margaluyu, Pulosari dan lainnya. Dengan ketinggian daerah terletak pads 1400 mdpl dan suhu berkisar 15-18- C, wilayah ini sangat cocok untuk perkebunan clan pertanian sayur.

Lahan – lahan pertanian di Pangalengan terbilang sangat subur clan produktif. Mayoritas lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam komoditas pertanian yang komersil seperti sayur – sayuran holtikultur. Antara lain wortel, kubis, kentang, tomat, cabal clan lainnya, serta clan tanaman perkebunan seperti teh. Sementara dari segi kepemilikan lahan didominasi oleh perusahaan–perusahaan milik pemerintah maupun swasta dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu masih terdapat jugs beberapa orang yang menguasai sejumlah areal lahan secara individu dalam skala yang cukup besar.

Sebagian besar penduduknya menjadi buruh kebun di perkebunan –perkebunan milik perusahaan-perusahaan swasta ataupun negara clan berkebun dilahan-lahan sewaan ataupun lahan sendiri. Sementara yang mempunyai lahan sendiri sangat minoritas. Upah buruh tani clan buruh kebun di sektor ini pun sangat minim, yakni sebesar Rp. 7000/hari untuk laki – laki (Rp.210.000/bulan) clan perempuan Rp.5000/hari (Rp.150.000/bulan). Hal ini kemudian menjadikan salah satu alasan pokok mengapa kehidupan masyarakat Pangalengan berada di bawah garis kemiskinan. Dengan rasio penclapatan sebesar Rp.150.000 s/d Rp.210.000 per bulan, hasil jerih payah selama satu bulan hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa hari, memenuhi kebutuhan pokok pangan. Alhasil, kebutuhan hidup lainnya seperti seperti pendidikan dan kesehatan keluarga ticlak terjangkau clan terabaikan.

Penulis aktif di organisasi serikat tani perempuan SERUNI yang alamt sekretarianya di Bandung

Mayoritas penduduk beretnis sunda clan beragama Islam. Kehidupan beragama masyarakat cukup kental, sehingga mempengaruhi pola interaksi dalam hubungan produksi diantara mereka. Misalnya banyak tuan tanah lokal yang menjadi pemuka agama, sehingga menyebabkan bias kontradiksi antara tuan tanah dengan buruh tani. Karena pars buruh tani kemudian menjadi segan untuk menuntut haknya kepada tuan tanah tersebut, atau berpandangan bahwa si tuan tanah tersebut sebenarnya orang balk clan berilmu tinggi.

Ditinjau dari segi pendidikan, mayoritas berpencliclikan SD clan sama seperti di berbagai wilayah lainnya di Indonesia, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil pula jumlah penduduk yang dapat mengaksesnya. Secara fasilitas, di wilayah tersebut juga hanya terdapat 2 SMP clan 1 SMA. Maka dengan demikian tidak heran pula bila sangat terbatas lapangan kerja yang dapat diakses oleh penduduk, dengan bayaran yang jauh dibawah standar kebutuhan hidup layak.

Secara geografis Kecamatan Pangalengan adalah wilayah pegunungan yang beriklim ekstrim. Suhu dingin sepanjang hari ditambah dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, cukup untuk menjadikan seorang anak atau orang dewasa sekali pun yang tidak dalam kondisi stabil menjadi sakit. Hal ini diperparah dengan kondisi udara yang sudah terpolusi oleh obat–obatan kimia yang cligunakan untuk pertanian. Selain juga letak rumah penduduk yang berdekatan dengan kandang-kandang hewan peliharaan, clan jarangnya rumah penduduk yang memiliki kamar mandi yang layak merupakan salah sekian clarnpak dari kemiskinan yang diderita oleh penduduk.

Fasilitas kesehatan yang ada di Pangalengan pun sulit untuk dijangkau bagi masyarakat setempat. Pertama karena letak Puskesmas yang berjauhan clan jarang, sebagai perbandingan 1 Puskesmas untuk 6 desa. Kedua, tersedianya Puskesmas tidak membuat masyarakat menjadi lebih muclah dalam mengakses layanan kesehatan. Permasalahan utama adalah biaya berobat dan harga obat yang tidak sanggup dijangkau oleh masyarakat karena mahal. Belum lagi masyarakat masih harus menyisihkan uangnya untuk ongkos transportasi ke Puskesmas jika ingin berobat. Sehingga bisa dibayangkan masyarakat harus mengeluarkan uang berkali-kali lipat hanya untuk memerikasakan kesehatannya. Satu-satunya cars yang cliternpuh oleh masyarakat Pangalengan ketika menghadapi situasi ini adalah memanfaatkan jalur pengobatan tradisional dengan pengetahuan lokal yang ada.

Kaum Perempuan

Kemiskinan masyarakat di Pangalengan berdampak pads berbagai hal ketertinclasan dan ketermarginalan kaum perempuannya di berbagai lapangan kehidupan masyarakat. Mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kebudayaan yang terbelakang, akses terhadap perbaikan kondisi ekonomi, hingga tidak diakomodasinya kepentingan clan suara kaum perempuan ini dalam berbagai proses politik yang berlangsung.

Perempuan pangalengan hidup dalam kondisi masyarakat yang sangat feodal. Bentuk-bentuk praktek feodal yang ada di pangalengan antara lain adalah tingkat poligami yang tinggi, pernikahan anak-anak perempuan dibawah umur, diskriminasi upah terhadap buruh – buruh kebun perempuan clan peranan istri dalam rumah tangga yang sangat banyak sebagai pengurus keluarga, namun juga masih tetap bekerja sebagai penggarap lahan.

Peran para perempuan ini dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga mereka tidak dapat dikatakan sebagai membantu, sebagaimana yang kerap kali di istilahkan oleh kelompok-kelompok yang bias gender. Termasuk juga negara di dalamnya. Sering kali yang terjadi adalah hasil kerja para perempuan ini menjadi yang utama dalam menghidupi ekonomi keluarganya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : 1). Para tuan tanah, perorangan maupun perusahaan, lebih senang menggunakan jasa kaum perempuan sebagai buruh kebun, karena upah mereka jauh lebih murah dibandingkan dengan upah kaum laki-laki; 2). Oleh karena itu imbasnya adalah, mayoritas kaum perempuan bekerja sebagai buruh kebun sementara kaum laki-laki mencari pekerjaan yang lain. Misalnya menjadi tukang ojek, dengan tingkat penghasilan perbulan/perhari yang tidak pasti; 3). Kehidupan ekonomi yang semakin sulit memaksa kaum perempuan untuk tidak lagi semata-mata mengurus keluarga namun juga masuk ke ranch ekonomi produksi untuk menghidupi keluarganya.

Akan tetapi meskipun kaum perempuan telah mengambil peran utama untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini tidak serta-merta membuat peran

mereka diakui secara sosial politik dalam keluarga clan masyarakat. Kaum perempuan pangalengan tetap berada dibarisan terdepan dalam menjalani kemiskinan clan ketertinclasan mereka, clan suara serta kepentingan mereka secara ekonomi sosial politik tetap harus diletakan ditempat paling belakang.

Dalam lapangan kesehatan, sebagaimana di berbagai wilayah lain di Indonesia akses kaum perempuan miskin terhadap fasilitas kesehatan yang rnbrah clan berkualitas sangat sulit. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, fasilitas puskesmas yang ada di kecamatan tersebut sangat tidak memadai dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan bagi masyarakat miskin, kemiskinan yang mereka hadapi telah membuat mereka menempatkan kesehatan sebagai prioritas paling belakang. Sehingga bagi kaum perempuan, ketika mereka berhadapan dengan situasi yang membutuhkan clukungan medis banyak diantara mereka yang "lari" kepengobatan tradisional.

Kondisi ini misalnya terlihat dari banyaknya perempuan yang proses persalinannya dibantu oleh dukun beranak hanya karena ketidakadaan bidan di puskesmas. Sementara persalinan di bidan swasta yang membutuhkan biaya sangat mahal untuk ukuran keluarga buruh tani dan tani miskin di wilayah tersebut. Hingga Rp.750.000,00/kelahiran. Proses persalinan yang tidak aman ini ternyata membawa resiko yang sangat besar bagi perempuan, hingga kematian. Mulai dari penggunaan alai bantu persalinan yang tidak aman clan tidak terjamin kebersihannya, kurang cliperhatikannya kesehatan ibu pasca persalinan, hingga kematian ibu dan bayinya karena ketidakmampuan penolong persalinan memberikan tindakan yang tepat bila terjadi situasi-situasi clarurat medis. Selain itu kemiskinan juga menjadi biang keladi dari tidak terpenuhinya gizi bagi, balita clan anak-anak disana.

Di lapangan pendidikan, mayoritas perempuan ini bersekolah hanya sampai SD. Bahkan dikelompok perempuan yang berusia 30 tahun keatas, masih banyak diantara mereka yang buts huruf. Selain karena jauh clan mahalnya fasilitas pendidikan untuk diakses oleh masyarakat, juga karena budaya massa yang menilai bahwa sekolah hanya buang-buang uang saja clan tidak ada manfaatnya. Karena sekolah tinggi tidak serta-merta menjadi jalan keluar dari kemiskinan mereka, sebab lapangan pekerjaan yang layak tetap saja tidak cukup tersedia clan berada diluar jangkauan mereka.

Di lapangan kehidupan sosial kebudayaan, masih banyak dijumpai kasus perkawinan di usia muda, poligami dan tingginya tingkat kawin cerai. Di Pangalengan juga masih berlaku budaya kawin muda, anak-anak perempuan usia 13-15 tahun sudah dikawinkan oleh orang tuanya dan biasanya pars calon suami mereka berusia jauh lebih tua. Bahkan ada perbedaan umur hingga 25-30 tahun antara pasangan suami-istri. Perbedaan usia yang jauh ini juga merupakan salah satu ciri yang menunjukan bahwa biasanya si perempuan adalah istri yang kesekian, bila kasusnya bukan poligami maka hampir dapat dipastikan itu adalah kawin cerai.

Dalam semua kasus-kasus ini, posisi tawar perempuan hampir dapat dikatakan tidak ada. Kawin muda sudah membudaya, dan bila hingga usia 17 seorang anak perempuan belum menikah maka dia akan cenderung menjadi pemalu dan tersisih dari pergaulan. Biasanya yang menentukan siapa calon suaminya adalah pihak orang tua laki-laki (bapak) atau pihak laki-laki atas persetujuan orang tua laki-laki si perempuan. Demikian juga bila si anak perempuan ternyata menjadi istri yang kesekian, atau di poligami, hal tersebut tidak lah terlalu menjadi masalah. Dari pads sama sekali tidak ada yang meminang. Kemudian bila ternyata perkawinan tersebut tidak langgeng maka dengan mudah perceraian dilakukan, atau si laki-laki akan mencari istri barn bila ternyata dia penggemar poligami.

Akan tetapi setelah diperiksa lebih dalam, ternyata cukup banyak kasus kawin muda dan poligami ini yang bermotif ekonomi. Orang tua ingin cepat-cepat mengawinkan anaknya, tidak perduli si anak akan menjadi istri keberapa atau apakah calon suaminya tersebut adalah orang yang tepat atau tidak, karena hendak memindahkan beban ekonomi yang ditanggungnya selama ini. Karena biasanya di keluarga-keluarga ini memiliki cukup banyak anak, lebih dari 3 per KK, sehingga beban konsumsi yang ditanggungnya juga cukup berat. Terutama dalam kondisi ekonomi yang makin morat-marit seperti sekarang ini. Juga tidak terlalu bermasalah bila ternyata si calon suami tidak punya pekerjaan, karena hal tersebut bukanlah urusan si orang tua lagi bila anaknya telah menikah dengan laki-laki tersebut. Imbasnya kemudian adalah peran ganda si perempuan, mau tidak mau dia harus bekerja untuk menghidupi anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Demikian juga motif si pelaku poligami, cukup banyak bapak-bapak yang berpoligami mengaku bahwa mereka memiliki istri lebih dari 1 dengan tujuan supaya

lebih banyak orang yang mencari makan untuk menghidupi keluarga tersebut. Suatu cara berpikir yang susah diterima akal sehat karena bukankah dengan demikian juga akan semakin banyak mulut yang harus cliberi makan? Akan tetapi begitulah kenyataannya. Selain itu dalam cukup banyak kasus kawin cerai, yang kerap terjadi adalah si perempuan clitinggal begitu saja clan harus menanggung hidup anak-anaknya tanpa kontribusi sang mantan suami sama sekali. Dan hal ini kemudian menjadi motif baginya untuk mencari suami barn yang dapat diajak berbagi beban ekonomi.

Perlawanan

Sejak jaman kolonial, lahan-lahan di Pangalengan berada di tangan pihak perkebunan swasta kaum kolonialis, demikian juga ketika jaman pencluclukan Jepang. Akan tetapi ketika telah terjadi kemerdekaan clan nasionalisasi aset-aset milik kolonial ke tangan pemerintah RI, kepemilikan lahan di Pangalengan beralih ke tangan perusahaan negara clan tentara, ticlak pernah didistribusikan kebali ke tangan masyarakat sebagai pemilik sahnya. Meskipun memang ada sebagian kecil lahan yang memang dimiliki oleh masyarakat sejak turun temurun, diluar lahan-lahan yang telah diambil oleh kolonial pads era sebelumnya.

Akan tetapi ketika naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, mulai terjadi peralihan tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat tersebut kepada pihak swasta. Dengan berbagai macam cara, mulai dari ditipu oleh makelar-makelar lokal agar masyarakat mau menjual tanah mereka hingga di intimiclasi oleh aparat yang dibayar oleh perusahaan. Bentuk tuan tanah dalam hal ini pun beragam, bukan hanya perorangan, namun juga berbentuk perusahaan. Bahkan perusahaan milik negara, seperti PTPN dan perusahaan perkebunan milik Pemda Jabar, yang ticlak segan-segan menggunakan aparat untuk mengintimidasi masyarakat agar mau menyerahkan tanahnya dengan harga murah. Dengan terjadinya peralihan kepemilikan tanah tersebut, maka masyarakat yang sebelumnya masih memiliki sedikit lahan kemudian mulai beralih menjadi buruh tani clan tani miskin yang kepemilikannya atas lahan ticlak lebih dari 0,5Ha. Atau dengan kata lain, hanya sepetak tanah tempat rumah mereka berdiri.

Kemudian komposisi klas dalam masyarakat Pangalengan terbagi menjadi klas petani kaya yang sangat seclikit sekali, petani sedang, petani miskin. Tetapi yang mendominasi adalah petani miskin yang bekerja menjadi buruh kebun ataupun buruh tani pads tuan tanah perorangan, perusahaan ataupun perkebunan pemerintah. Didorong dari kebutuhan akan lahan dalam memenuhi kebutuhan hiclup, maka kaum tani mulai membangun sebuah organisasi massa yang bernama AGRA. AGRA berfungsi sebagai wadah perjuangan kaum tani untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah. Salah satu wujud perjuangan tersebut adalah melakukan reklaiming lahan pads Juli 2004 dari perusahaan bibit ungggul BBU milik Pemda Jabar dan tuan tanah perseorangan yang menyewa lahan pads BBU. Hingga saat ini kondisi kehidupan kaum tani mulai mengalami perbaikan setelah memiliki lahan garapan hasil reklaiming tersebut.

Dalam perjuangan kaum tani di Pangalengan ini, kaum perempuan tani telah terlibat secara aktif sejak dari awal. Baik dalam keikutsertaan mereka dalam pertemuan-pertemuan, maupun ketika melakukan reklaiming. Perempuan berada pads barisan paling depan. Hal ini dapat dilakukan karena kami menyadari bahwa bagian mayoritas dari kaum tani yang tak bermilik ini adalah perempuan, clan penindasan terhadap mereka menjadi berkali-kali lipat. Bukan hanya karena mereka adalah kaum tani, tetapi juga karena mereka adalah kaum tani perempuan yang tenaga kerjanya dihargai jauh lebih murah daripada yang seharusnya.

Selain itu pula, kami juga berpanclangan bahwa akar penindasan terhadap kaum perempuan adalah pads hubungan produksi feodal yang berakar pads persoalan tanah. Oleh karena itu untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan ini maka mereka juga harus terlibat secara aktif untuk menggerus clan menghapuskan hubungan produksi feodalisme, clan salah satunya adalah melalui cara memperoleh hak yang sama terhadap akses atas lahan garapan. Dengan cara ini secara perlahan kami mengupayakan untuk mendorong tegaknya, dan diakuinya secara material clan konkret, hak-hak kaum perempuan ini secara ekonomi clan politik.

Pasca reklaiming proses pengorganisasian yang lebih fokus terhadap kaum perempuan tani ini pun mulai dilakukan. Diawali dengan pendiskusian mengenai pentingnya kaum perempuan untuk berorganisasi dan terlibat bersama-sama dalam perjuangan rakyat di pengurus dan kelompok-kelompok tani, yang notebene isinya

mayoritas adalah kaum laki-laki. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan : 1). Mengantisipasi budaya patriarki di kalangan kaum tani tersebut yang kemungkinan akan menjadi penghambat untuk memajukan kaum perempuan di wilayah tersebut. Misalnya, para swami kemungkinan akan melarang para istri mereka untuk datang dalam pertemuan-pertemuan; 2). Sedari awal mencoba untuk melibatkan kaum laki-laki untuk percluli clan turut menclukung perjuangan isu-isu perempuan. Sehingga isu-isu perempuan tidak akan menjadi elitis hanya dipahami oleh kaum perempuan semata.

Setelah itu mulai membangun kontak dengan beberapa orang perempuan tani dan menyelenggarakan diskusi-diskusi, sehingga kemudian disepakati bersama untuk memperluas kontak dan kelompok diskusi yang ada. Setelah ada beberapa kelompok diskusi perempuan, bersama-sama kits mulai mencoba mengidentifikasi persoalan apa saja yang dihadapi oleh kaum perempuan di wilayah tersebut. Sehingga kemudian ditemukan beberapa persoalan pokok, yaitu ekonomi-masalah diskriminasi upah antara buruh laki dengan perempuan, mahalnya harga-harga kebutuhan pokok; kesehatan-ketidaktersediaan posyandu clan puskesmas yang berkualitas murah clan dapat diakses oleh masyarakat, kontrasepsi murah clan berkualitas; pendidikan-maraknya buts huruf dikalangan perempuan; politik-keterlibatan perempuan dalam proses politik yang berlangsung; budaya-kawin muds, poligami, kawin cerai, dll.

Akan tetapi dari keseluruhan permasalahan yang ada, yang paling mendesak bagi kaum perempuan disana adalah masalah ekonomi dan ketiadaan alai produksi sebagai sumber penghidupan. Sementara disisi lain kondisi organisasi yang barn clibentuk sedikit memberatkan bila hendak didorong untuk mengangkat berbagai macam isu dalam 1 waktu yang sama, sehingga dipustuskan untuk mengangkat beberapa masalah dulu yang pokok sebagai isu perjuangan. Yaitu persoalan lahan dan masalah kesehatan reproduksi.

Kemenangan-Kemenangan Kecil

Demikian awal mula pembangunan perjuangan kaum perempuan di Pangalengan, yang dimulai awal 2005. Selama proses 3 tahun berikutnya hingga saat ini, serangkaian aksi-aksi untuk pengelolaan dan mempertahankan lahan yang telah

t

diambil-alih tersebut telah dilakukan. Mulai dari menuntut ke Pemda atas pengesahan hak rakyat untuk mengelola lahan yang sebelumnya tersebut memang adalah milik mereka, meminta dukungan dan DPRD I dan II, hingga perjuangan berhadap-hadapan dengan militer clan preman yang dibayar oleh para tuan-tuan tanah untuk mengambil kembali lahn tesebut. Dam keseluhan proses pejuangan tesebut [illegible] perempuan telah terlibat secara aktif, bukan hanya menjadi baris anak depanga

atau berdiri paling depan ketika menghadapi moncong senjata militer. Melainkan juga dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat menentukan mass depan bersama.

Demikian juga ketika berlangsung konferensi AGRA tingkat desa pads pertengahan April 2008 kemarin yang 80% dari anggotanya adalah kaum laki-laki, dari 7 orang anggota badan pimpinan yang terpilih 2 diantaranya adalah perempuan dengan jumlah suara pemilih terbesar pertama clan kedua. Kedua orang perempuan tersebut juga merupakan pimpinan SERUNI di tingkat ranting yang bersangkutan. Hal ini adalah sekian dari kemenangan-kemenangan kecil yang mulai mewujud, ketika gender secara perlahan mulai tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pimpinannya. Melainkan penilaian secara objektif terhadap kualitas clan kemampuan seseorang tersebut secara rasional, tidak perduli dia laki-laki atau perempuan. Dan hal ini berlangsung dalam sebuah komunitas masyarakat kaum tani yang selama ini sangat terbelakang dari segi kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan politik.

Kemenangan-kemenangan kecil lainnya juga mulai terlihat dari berlangsungnya perubahan cars pandang dan perilaku masyarakat setempat. Misalnya saja dalam hal pengasuhan anak ketika para Ibu harus rapat dan diskusi, selama ini anak-anak selalu dibawa Ibunya atau dititip ke tetangga. Akan tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, para bapak dengan sukarela clan tanpa diminta menyediakan dirinya untuk menjaga anak-anak mereka. Bahkan lebih jauh lagi ada beberapa orang suami yang dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas domestik yang selama ini menjadi tanggung jawab perempuan. Seperti memasak nasi clan membersihkan rumah atau membantu istrinya mencuci. Dan hal ini tidak hanya dilakukan ketika si istri ada agenda pertemuan organisasi, melainkan mulai menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian juga dengan kaum laki-laki lainnya yang, meskipun, belum menerapkan hal ini namun sudah tidak lagi mencerca atau mendiskreditkan para suami yang menjalankan

Dengan demikian dapat kits buktikan secara konkret bahwa ternyata dengan mendorong clan memposisikan isu-isu perempuan sebagai bagian dari perjuangan rakyat, dan tidak menempatkannya secara eksklusif seakan-akan hanya menjadi masalah kaum perempuan saja, serta melibatkan kaum perempuan secara aktif sebagai bagian dari kekuatan perjuangan rakyat maka perubahan, meskipun masih skala kecil, namun secara signifikan dapat diraih. Bukti yang paling nyata dari hal ini adalah pads peran clan fungsi kerja domestik yang selama ini, sejak dari awal mula penindasan berlangsung, dilekatkan terhadap kaum perempuan secara perlahan mulai dapat dibagi secara setara dengan pasangannya dalam rumah tangga. Yaitu sang suami/bapak/laki-laki. Pembagian peran clan kerja domestik yang lebih setara clan adil ini dapat dilakukan juga karena telah lahirnya kesadaran secara objektif dari pihak laki-laki.

Daiam isu kawin muds/usia dini, juga sudah mulai menunjukan hasil yang cukup signifikan. Meskipun, lagi-lagi, hal ini masih terlihat sangat nyata di kalangan anggota. Yaitu bahwa kaum perempuan, terutama pars lbu, sudah berani secara tegas menolak anak-anak perempuannya dikawinkan di usia muds/dini. Dan yang lebih pokok lagi adalah ketika pars 'perempuan tersebut mampu menjelaskan argumentasi penolakan mereka secara 'tepat clan rasional sehingga sulit untuk dibantah. Sementara untuk isu kespro lainnya, masih mengalami hambatan untuk dapat melakukan perubahan yang lebih struktural karena harus berhadapan dengan kemandegan clan kebebalan aparatus negara di tingkat desa. Oleh karena itu usaha yang dilakukan saat ini adalah dengan mencoba meraih konsolidasi dukungan yang lebih lu[9]s lagi di masyarakat setempat, meskipun hal ini masih belum menunjukan hasil yang cukup balk.

Akan tetapi perlawanan yang paling sulit untuk dilakukan adalah terhadap budaya poligami. Dampak yang diharapkan masih jauh panggang dari api. Bila tadinya poligami dilakukan secara terbuka, yang terjadi saat ini adalah poligami dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi dari organisasi. Sementara ini yang juga dilakukan oleh organisasi untuk isu tersebut juga dengan melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang tidak mau dipoligami, agar mereka mendapatkan haknya bila terjadi perceraian. Juga mengantisipasi poligami sebelum hal itu terjadi, yaitu dengan melakukan pendekatan clan memberikan pendidikan terhadap kaum perempuan yang akan dijadikan istri berikutnya agar mereka memahami hak-haknya dan tidak mau dipoligami.